

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)**



Oleh:

MUHAMMAD NAZIHUN

1800024059

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

**ANALYSIS OF COAL MINING TAX REVENUE IN INDONESIA BASED ON
ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION IN
REALIZING THE WELFARE STATE**



Written by:

MUHAMMAD NAZIHUN

1800024059

*This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the
Bachelor of Law*

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amir" followed by a stylized surname.

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

NIPM: 19641028 201810 111 1253959

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**ANALYSIS OF COAL MINING TAX REVENUE IN INDONESIA BASED ON
ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION IN
REALIZING THE WELFARE STATE**

*This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the
Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan*



SUPERVISOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Sobirin Malian".

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

NIPM: 19641028 201810 111 1253959

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

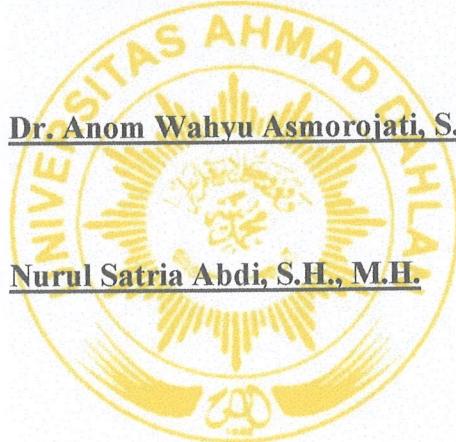
Pada Tanggal: 17 Mei 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

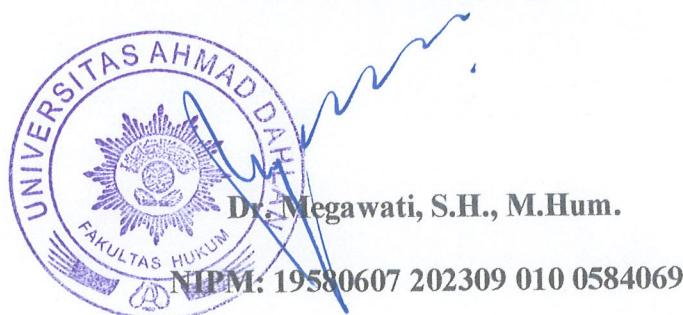


Two handwritten signatures are present on the right side of the document. The top signature appears to be "Sobirin" and the bottom one appears to be "Anom Wahyu Asmorojati".

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



EXAMINER BOARD APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At The Date: 17 Mei 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman

: Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.



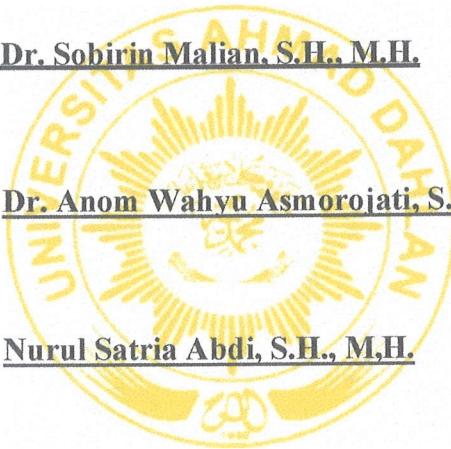
Examiner I

: Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.



Examiner II

: Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nazihun

NIM 1800024059

Email : muhammadnazihun1800024059@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Pajak Pertambangan Batu Bara di Indonesia
Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan
(*Welfare State*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 17 Mei 2024



Muhammad Nazihun

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nazihun

NIM 1800024059

Email : muhammadnazihun1800024059@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Pajak Pertambangan Batu Bara di Indonesia
Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan
(*Welfare State*)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

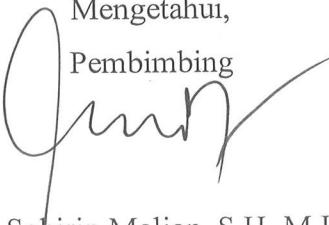
Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Mei 2024



Muhammad Nazihun

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Sobirin Malian, S.H, M.H.

NIPM. 19641028201810111253959

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Setiap masa ada manusianya, setiap manusia ada masanya”
(Muallim Harahap, M.Pd)

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan”
(Q.S. Al-Baqarah: 148)

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”
(Umar bin Khattab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam selesainya seluruh proses penggerjaan skripsi ini:

- Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan do'a-do'a saya dan memberikan kelancaran di setiap langkah saya
- Kepada orang tua saya, terima kasih atas segala do'a dan kasih sayangnya Abah dan Mamah Syaifullah & Hartati, serta adik saya Alm. Muhammad Nazif Al-Farise dan Harsya Alya Putri yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada saya dalam perkuliahan ini
- Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di Yogyakarta yaitu Syaidina Akasyah, Gohara, Calvin, Bong, Ekik, Sony, Aqli, Vidi Hantu, Farhan, Fajar, Rafky Padang, dan Abang Yudhi karena selalu ada dan selalu memberikan do'a dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberi kelancaran dan kemudahan, serta tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Pajak Pertambangan Batu Bara di Indonesia Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Proses penggeraan ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai dan dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas dukungan dan motivasi ilmu beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala ilmu dan saran beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya guna memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga dan berterima kasih memiliki pembimbing seperti beliau. Semoga bapak selalu dilindungi oleh Allah SWT.

4. Ibu Deslaely Putranti, S.H., M.H. selaku Dosen Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan masa studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan karena telah membantu seluruh proses dari awal perkuliahan hingga selesainya perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya terimakasih atas segala do'a dan kasih sayangnya Abah dan Mamah Syaifulah & Hartati, serta adik saya Alm. Muhammad Nazif Al-Farise dan Harsya Alya Putri yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada saya dalam perkuliahan ini.
8. Kepada sahabat-sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu Syaidina Akasyah, Gohara, Calvin, Bong, Ekik, Sony, Aqli, Vidi Hantu, Farhan, Fajar, Rafky Padang, dan Abang Yudhi karena selalu ada dan selalu memberikan do'a serta dukungan yang tiada henti selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam memberikan sumbangsih keilmuan baik secara langsung maupun tidak sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkenan dengan tulus dan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan

terima kasih, semoga Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan yang
Insha Allah akan lebih baik lagi, Amin YRA.

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SUPERVISOR APPROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
EXAMINER BOARD APPROVAL PAGE	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Lembaga.....	6
2. Masyarakat	7
3. Penulis	7
4. Referensi	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	13
1. Definisi Pajak	13
2. Jenis-Jenis Pajak	14
3. Fungsi Pajak	18
4. Teori Negara Hukum.....	20
5. Teori <i>Welfare State</i>	21
BAB III ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) 23	

A. Hasil Penelitian.....	23
B. Pembahasan.....	24
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Pada Sektor Pertambangan Batu Bara.....	24
a) Menerapkan Asas Keadilan dalam Pungutan Pajak Batu Bara	24
b) Pajak Batu Bara Menopang APBN untuk Pembangunan Nasional.....	32
c) Memanfaatkan Pajak Batu Bara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.....	42
2. Hambatan dan Solusi dalam Pemungutan Pajak Batu Bara.....	49
a) Lemahnya Penegakan Hukum dalam Sektor Pajak Batu Bara	49
b) Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sektor Batu Bara	55
c) Lemahnya Pengawasan Kementerian Pajak Terhadap Pelaku Pelanggar Pajak	59
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)**

ABSTRAK

Negara kesejahteraan menjadi cita-cita seluruh bangsa khususnya Indonesia. Namun, untuk membangun negara kesejahteraan dibutuhkan anggaran dana yang sangat besar untuk pembangunan saat ini dan kedepannya. Pemerintah bertugas untuk memaksimalkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk mendapatkan pemasukan anggaran yang sangat besar. Harapannya pajak yang didapatkan dari sumber daya alam dapat menjadi surplus bagi pemasukan negara. Sayangnya, banyak pihak wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa kasus mencatat bahwa pertambangan batu bara di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Adanya sistem perpajakan yang buruk dari internal aparat pajak juga turut berdampak pada semakin rendahnya kesadaran membayar pajak banyak pihak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu bara, serta hambatan dan solusi pemungutan pendapatan pajak dari pertambangan batu bara setelah diterapkannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan terlebih dahulu yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan mengaitkannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pada penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil di lapangan seperti optimalisasi pendapatan pajak batu bara dapat dilakukan dengan cara menerapkan asas keadilan dalam pemungutan pajak batu bara, lalu menggunakan pajak batu bara sebagai penopang APBN untuk pembangunan nasional, dan memanfaatkan pajak pertambangan agar berguna dan memiliki manfaat bagi rakyat. Akan tetapi dalam pemungutan pajak batu bara terdapat beberapa hambatan karena masih kurangnya penegakan hukum pada sektor pajak batu bara. Lalu, pihak yang berkecimpung dalam sektor batu bara memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam membayarkan pajak usaha batu baranya. Kementerian Pajak juga lemah dalam melakukan pengawasan administrasi terhadap para pelaku pelanggar pajak.

Kata Kunci: *Pajak; Batu Bara; Negara Kesejahteraan*

**ANALYSIS OF COAL MINING TAX REVENUE IN INDONESIA BASED ON
ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION IN
REALIZING WELFARE STATE**

ABSTRACT

A welfare state is the goal of all nations, especially Indonesia. However, to build a welfare state requires a very large budget of funds for current and future development. The government is tasked with maximizing Indonesia's abundant natural resources to obtain a very large budget income. It is hoped that taxes obtained from natural resources can become a surplus for state income. Unfortunately, many taxpayers do not comply with the regulations that have been set. Several cases noted that coal mining in Indonesia is indicated to have committed fraud in paying taxes. The existence of a poor taxation system from internal tax officials also has an impact on the lower awareness of paying taxes for many parties. This research was conducted to find out how to optimize tax revenue from coal mining, as well as obstacles and solutions to collecting tax revenue from coal mining after the implementation of Article 112 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in this thesis uses a type of empirical juridical legal research approach. Empirical juridical research is a combination of normative legal research and empirical research. This research is conducted by reviewing the literature first which will be used to help solve problems that occur in the field. The data source used is primary data and relates it to primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In the research that has been conducted, several results are obtained in the field such as optimizing coal tax revenue can be done by applying the principle of justice in coal tax collection, then using coal tax as a support for the state budget for national development, and utilizing mining taxes to be useful and have benefits for the people. However, in collecting coal tax there are several obstacles due to the lack of law enforcement in the coal tax sector. Then, parties involved in the coal sector have a low level of compliance in paying their coal business tax. The Ministry of Taxes is also weak in conducting administrative supervision of tax violators.

Keyword: Tax; Coal; Welfare State